

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda utama dalam reformasi birokrasi dan modernisasi tata kelola pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan dalam cara mengelola administrasi publik, dari sistem konvensional menuju sistem berbasis digital yang lebih efektif dan efisien. Transformasi digital dalam sektor publik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi semata, tetapi juga mencakup perubahan dalam proses kerja, tata kelola organisasi, serta pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mergel, Edelmann, & Haug, 2019). Oleh karena itu, digitalisasi pemerintahan menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan berorientasi pada kinerja.

Dalam konteks administrasi publik, pemanfaatan teknologi informasi menjadi instrumen penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan kinerja instansi pemerintah. Teknologi digital memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kinerja dilakukan secara lebih cepat, sistematis, dan terintegrasi sehingga dapat membantu pemerintah

dalam memantau pencapaian program dan kegiatan secara lebih akurat. Selain itu, penggunaan sistem digital juga memberikan kemudahan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja organisasi, karena data kinerja dapat diakses secara real time oleh berbagai pemangku kepentingan. Dengan adanya sistem informasi berbasis digital, proses pengelolaan kinerja tidak lagi bergantung pada laporan manual yang sering kali memerlukan waktu lama dan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan data. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan juga sejalan dengan konsep *electronic government (e-government)*, yaitu pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik (Heeks, 2006).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia juga mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Digitalisasi sistem pemerintahan dilakukan melalui pengembangan berbagai aplikasi dan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung proses administrasi publik, termasuk dalam bidang perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, serta pengukuran kinerja instansi pemerintah. Penerapan teknologi digital dalam pengelolaan kinerja menjadi penting karena kinerja pemerintah tidak hanya diukur dari pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari capaian hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan sistem digital dalam pengelolaan kinerja diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap

pelaksanaan program pemerintah sekaligus memperkuat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, a. 2014).

Selain meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja organisasi, transformasi digital dalam pemerintahan juga memiliki peran penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya transparansi dan akuntabilitas (Daniri, 2005). Dalam sistem pemerintahan yang modern, masyarakat menuntut agar pemerintah dapat memberikan informasi yang terbuka mengenai kinerja dan penggunaan sumber daya publik. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan transparansi pengelolaan pemerintahan sekaligus memastikan bahwa setiap program dan kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik. Dengan demikian, transformasi digital dalam pemerintahan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga untuk memperkuat sistem akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah (Mergel et al., 2019).

Salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pengelolaan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah adalah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan suatu sistem manajemen kinerja yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk merencanakan, mengukur, melaporkan, dan mengevaluasi kinerja organisasi secara sistematis dan berkelanjutan.

Melalui sistem ini, setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan kepada masyarakat secara transparan dan terukur. Dengan adanya SAKIP, pengelolaan kinerja tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan pembangunan. Oleh karena itu, SAKIP berperan penting sebagai instrumen manajemen kinerja dalam meningkatkan efektivitas organisasi pemerintah serta memastikan bahwa penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel (Mahmudi, 2015).

Secara normatif, penerapan SAKIP di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada masyarakat. (Santo, 2024). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa SAKIP mencakup beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan. Dalam perkembangannya, penerapan SAKIP juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi melalui berbagai sistem aplikasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data kinerja. Integrasi sistem digital dalam pengelolaan kinerja menjadi penting karena dapat membantu instansi pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara lebih akurat, transparan, dan terintegrasi antar

unit organisasi (Kementerian PANRB, 2020)

Seiring dengan perkembangan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan kinerja instansi pemerintah saat ini tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan didukung oleh berbagai sistem aplikasi berbasis digital. Dalam praktiknya, pengelolaan kinerja pemerintah daerah tidak hanya menggunakan satu sistem informasi, tetapi melibatkan beberapa aplikasi yang saling berkaitan dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja organisasi. Beberapa sistem aplikasi yang umum digunakan dalam pengelolaan kinerja pemerintah daerah antara lain aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), aplikasi E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta aplikasi E-Kinerja yang dikelola Badan Kepegawaian Negara yang digunakan dalam pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. Penggunaan berbagai aplikasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja organisasi secara lebih sistematis, terintegrasi, dan berbasis data (Kementerian PANRB, 2020).

Keberadaan sistem aplikasi tersebut memiliki peran penting dalam mendukung proses pemantauan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah. Melalui sistem digital, pemerintah daerah dapat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih efektif, sekaligus menilai sejauh mana capaian kinerja yang telah ditetapkan dapat

direalisasikan. Selain itu, penggunaan aplikasi digital juga mempermudah proses pelaporan dan pengolahan data kinerja sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan transparan. Dengan demikian, pemanfaatan berbagai sistem aplikasi dalam pengelolaan kinerja tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, tetapi juga untuk memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada masyarakat serta memastikan setiap program pembangunan dapat dievaluasi secara objektif dan terukur (Mahmudi, 2015; Kementerian PANRB, 2020).

Meskipun berbagai sistem aplikasi digital telah dikembangkan untuk mendukung pengelolaan kinerja instansi pemerintah, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam integrasi dan sinkronisasi data kinerja antar sistem yang digunakan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah adanya ketidaksesuaian data kinerja antar aplikasi, seperti antara aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), aplikasi E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) yang digunakan dalam proses pemantauan pelaksanaan program pembangunan daerah, serta aplikasi E-Kinerja yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. Perbedaan data tersebut dapat terjadi karena setiap sistem memiliki mekanisme pengelolaan data, tujuan penggunaan, serta indikator pengukuran kinerja yang berbeda. Dalam beberapa kasus, capaian kinerja yang tercatat dalam satu sistem tidak selalu sama dengan data yang tercatat dalam sistem lainnya, sehingga menimbulkan perbedaan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi sistem pengelolaan kinerja telah diterapkan, integrasi antar sistem informasi kinerja masih menjadi tantangan dalam pengelolaan kinerja pemerintahan (Mahmudi, 2015).

Ketidaksesuaian data kinerja antar aplikasi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam proses pengelolaan kinerja organisasi pemerintah. Perbedaan data antara sistem SAKIP, E-Monev, dan E-Kinerja dapat menyebabkan inkonsistensi informasi kinerja yang digunakan dalam proses monitoring, evaluasi, maupun pelaporan kinerja instansi pemerintah. Apabila data kinerja yang dihasilkan oleh berbagai sistem tidak selaras, maka proses evaluasi kinerja organisasi dapat menjadi kurang optimal karena adanya perbedaan sumber informasi yang digunakan dalam penilaian kinerja. Padahal, pengelolaan kinerja instansi pemerintah seharusnya dilakukan secara terintegrasi agar dapat menghasilkan informasi kinerja yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, penerapan sistem pengelolaan kinerja yang terintegrasi menjadi penting dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian data kinerja antar aplikasi dalam pengelolaan kinerja pemerintah daerah adalah adanya perbedaan indikator kinerja pada level sub kegiatan yang digunakan dalam masing-masing sistem. Perbedaan tersebut tidak terlepas

dari adanya perbedaan pendekatan kebijakan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dan Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan indikator kinerja instansi pemerintah. Dalam sistem SAKIP, penyusunan indikator kinerja dilakukan berdasarkan pendekatan pohon kinerja, yaitu hubungan logis antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, hingga sub kegiatan yang menunjukkan kontribusi setiap aktivitas terhadap pencapaian kinerja organisasi. Pendekatan ini menekankan bahwa indikator kinerja harus disusun secara rasional dan mencerminkan keterkaitan antara perencanaan dan hasil kinerja organisasi, sehingga setiap program dan kegiatan dapat diukur kontribusinya terhadap tujuan pembangunan yang telah ditetapkan (Bastian, 2016).

Di sisi lain, dalam sistem perencanaan dan pemantauan pembangunan daerah yang dikelola melalui aplikasi E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev), indikator kinerja pada level sub kegiatan pada umumnya mengikuti nomenklatur program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penggunaan nomenklatur tersebut bertujuan untuk menciptakan keseragaman struktur program dan kegiatan pembangunan di seluruh daerah sehingga memudahkan proses pengendalian, pelaporan, dan evaluasi pembangunan secara nasional. Namun demikian, perbedaan pendekatan antara sistem SAKIP yang berbasis pohon kinerja dan sistem perencanaan yang berbasis nomenklatur kegiatan nasional tersebut dapat menyebabkan perbedaan indikator kinerja pada level

tertentu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan data kinerja antar sistem digital, karena indikator yang digunakan dalam aplikasi SAKIP tidak selalu sama dengan indikator yang digunakan dalam sistem E-Monev, sehingga informasi capaian kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing sistem dapat berbeda (Bastian, 2016; Dwiyanto, 2018).

Dalam perspektif administrasi publik, penerapan sistem aplikasi digital dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah dapat dipahami sebagai bentuk inovasi dalam tata kelola pemerintahan modern. Penggunaan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi untuk pelaporan kinerja, tetapi juga merupakan inovasi dalam sistem manajemen kinerja sektor publik yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja organisasi pemerintah. Inovasi tersebut muncul sebagai respons terhadap tuntutan reformasi birokrasi yang mengharuskan instansi pemerintah mampu mengelola kinerja secara lebih terstruktur, terukur, dan berbasis hasil. Dengan adanya sistem digital seperti SAKIP, proses perencanaan, pengukuran, serta evaluasi kinerja organisasi dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terintegrasi sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pengelolaan kinerja instansi pemerintah. Dalam konteks organisasi publik, inovasi administratif seperti ini dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efektivitas kinerja serta memperbaiki sistem pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya bersifat konvensional (Osborne & Brown, 2011).

Dalam kajian inovasi organisasi, proses penerapan dan penyebaran suatu inovasi tidak terjadi secara otomatis, tetapi melalui proses yang disebut sebagai difusi inovasi. Difusi inovasi merupakan proses bagaimana suatu ide, teknologi, atau sistem baru diperkenalkan, dikomunikasikan, dan kemudian diadopsi oleh individu maupun organisasi dalam suatu sistem sosial tertentu. Konsep ini banyak dijelaskan dalam teori difusi inovasi yang menyatakan bahwa keberhasilan penerapan suatu inovasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik inovasi, proses komunikasi dalam organisasi, serta kesiapan lingkungan organisasi untuk menerima perubahan. Dalam konteks organisasi pemerintahan, penerapan inovasi seperti sistem digital pengelolaan kinerja sering kali memerlukan proses adaptasi kebijakan, koordinasi antar lembaga, serta penyesuaian sistem kerja organisasi agar inovasi tersebut dapat diterapkan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SAKIP sebagai sistem digital pengelolaan kinerja merupakan bagian dari proses inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang membutuhkan dukungan kelembagaan, kebijakan, serta kesiapan organisasi dalam mengadopsi sistem baru tersebut (Greenhalgh et al., 2004).

Selain itu, dalam kajian teori difusi inovasi juga dijelaskan bahwa penerapan inovasi dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana inovasi tersebut dipahami dan diterima oleh para pelaku organisasi yang terlibat dalam implementasinya. Ketika suatu inovasi diperkenalkan dalam organisasi, akan muncul berbagai proses adaptasi yang dipengaruhi oleh

kebijakan, struktur organisasi, serta kondisi lingkungan institusional yang ada. Dalam konteks pemerintahan daerah, penerapan aplikasi SAKIP sebagai inovasi sistem pengelolaan kinerja tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi digital, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana sistem tersebut diintegrasikan dengan berbagai sistem pengelolaan kinerja lainnya yang telah digunakan sebelumnya. Oleh karena itu, analisis mengenai penerapan aplikasi SAKIP dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah dapat dipahami melalui perspektif difusi inovasi, yaitu dengan melihat bagaimana inovasi sistem digital tersebut diadopsi, disesuaikan, dan diimplementasikan dalam lingkungan organisasi pemerintahan daerah (Osborne & Brown, 2011; Greenhalgh et al., 2004).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis digital juga dilaksanakan oleh berbagai perangkat daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja organisasi. Salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas utama dalam menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Peran tersebut menjadikan Satpol PP sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib, aman, dan kondusif. Oleh karena itu, sebagai bagian dari organisasi pemerintah daerah, Satpol

PP juga diwajibkan untuk menerapkan sistem pengelolaan kinerja yang akuntabel dan terukur, termasuk melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen manajemen kinerja organisasi (Mardiasmo, 2018).

Di tingkat daerah, penerapan SAKIP juga dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro sebagai bagian dari implementasi kebijakan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Penggunaan aplikasi SAKIP dalam instansi tersebut bertujuan untuk mendukung proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja organisasi secara lebih sistematis dan terintegrasi. Melalui sistem tersebut, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dapat dipantau dan dievaluasi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja organisasi. Implementasi sistem pengelolaan kinerja berbasis digital di lingkungan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, penerapan aplikasi SAKIP dalam organisasi perangkat daerah seperti Satpol PP menjadi bagian penting dalam mendukung penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (LAN, 2020).

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap perangkat daerah diwajibkan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari pengelolaan kinerja berbasis hasil. Penerapan SAKIP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat direncanakan, diukur, serta dievaluasi secara sistematis. Salah satu perangkat daerah yang telah menerapkan sistem tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, nilai SAKIP pada Satpol PP mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Adapun nilai SAKIP Satpol PP Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.
NILAI SAKIP SATPOL PP KABUPATEN BOJONEGORO

Tahun	Nilai SAKIP	Predikat
2024	74,11	BB (Sangat Baik)
2025	75,01	BB (Sangat Baik)

Sumber: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai SAKIP Satpol PP Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 74,11 menjadi 75,01 pada tahun 2025 dengan predikat BB (Sangat Baik). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja di lingkungan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro telah berjalan sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung.

Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator. Ada perbaikan pada beberapa aspek penilaian, seperti perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal. Meskipun demikian, hasil evaluasi tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang belum menyeluruh di seluruh unit kerja, terutama dalam hal keselarasan indikator kinerja, kelengkapan data dukung yang relevan, serta optimalisasi penggunaan aplikasi dalam proses pengukuran dan pelaporan kinerja.

Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan pemerintah daerah, penggunaan sistem digital tidak hanya dilakukan melalui aplikasi SAKIP, tetapi juga melalui sistem lain yang digunakan dalam proses monitoring dan evaluasi pembangunan. Perbedaan sistem yang digunakan dalam pengelolaan kinerja tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data kinerja, terutama apabila indikator yang digunakan dalam masing-masing sistem tidak sepenuhnya selaras. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem digital dalam pengelolaan kinerja masih memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya dalam melihat bagaimana proses penerapan dan penyebaran penggunaan aplikasi SAKIP dalam organisasi perangkat daerah.

Selain nilai akhir SAKIP, hasil evaluasi juga menunjukkan penilaian pada setiap komponen akuntabilitas kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Perbandingan nilai pada setiap komponen tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.
KOMPONEN PENILAIAN SAKIP
SATPOL PP KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024–2025

No.	Komponen	Bobot	2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	22.50	23.10
2.	Pengukuran Kinerja	30	21.60	21.60
3.	Pelaporan Kinerja	15	11.25	11.55
4.	Evaluasi Internal	25	18.75	18.75
	Total	100	74.11	75.01

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, *Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025*, diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai pada setiap komponen penilaian SAKIP Satpol PP Kabupaten Bojonegoro menunjukkan adanya peningkatan pada beberapa aspek, terutama pada komponen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja. Komponen perencanaan kinerja mengalami peningkatan dari 22,50 pada tahun 2024 menjadi 23,10 pada tahun 2025, sedangkan komponen pelaporan kinerja meningkat dari 11,25 menjadi 11,55. Namun demikian, pada komponen pengukuran kinerja dan evaluasi internal tidak mengalami perubahan nilai, sehingga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam proses pengelolaan kinerja organisasi.

Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat beberapa catatan yang berkaitan dengan keselarasan indikator kinerja, kelengkapan data dukung yang relevan, serta optimalisasi penggunaan sistem dalam proses pengukuran dan evaluasi kinerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja berbasis digital masih memerlukan penyempurnaan agar data kinerja yang dihasilkan dapat lebih akurat dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan aplikasi SAKIP dalam organisasi perangkat daerah, khususnya dalam mendukung transformasi digital pengelolaan kinerja.

Selain nilai hasil evaluasi, laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja juga menunjukkan beberapa catatan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro. Dalam hasil evaluasi disebutkan bahwa pengukuran kinerja telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi SAKIP yang terintegrasi dengan sistem monitoring dan evaluasi, namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Beberapa catatan yang ditemukan antara lain indikator kinerja yang belum sepenuhnya selaras dengan pohon kinerja serta belum lengkapnya data dukung capaian kinerja pada aplikasi yang digunakan dalam proses pelaporan kinerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis

digital masih memerlukan penyempurnaan agar dapat menghasilkan data kinerja yang lebih akurat dan konsisten.

Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan pemerintah daerah, penggunaan sistem digital tidak hanya dilakukan melalui aplikasi SAKIP, tetapi juga melalui sistem monitoring dan evaluasi pembangunan yang digunakan oleh perangkat daerah. Perbedaan pendekatan dalam penyusunan indikator kinerja antara sistem yang berbasis pohon kinerja dengan sistem yang mengikuti nomenklatur kegiatan dapat menyebabkan ketidaksesuaian data kinerja antar aplikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa integrasi sistem digital dalam pengelolaan kinerja belum sepenuhnya berjalan optimal dan berpotensi menimbulkan perbedaan informasi capaian kinerja dalam proses monitoring dan evaluasi organisasi.

Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, karena penerapan aplikasi SAKIP sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan kinerja seharusnya mampu menghasilkan data kinerja yang selaras, terintegrasi, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menganalisis bagaimana proses difusi aplikasi SAKIP dalam mendukung transformasi digital pengelolaan kinerja, khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.

Dalam konteks pengelolaan kinerja pemerintahan yang semakin mengandalkan sistem digital, integrasi antar sistem informasi kinerja menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan konsistensi dan

keakuratan data kinerja instansi pemerintah. Sistem pengelolaan kinerja yang terintegrasi memungkinkan setiap instansi pemerintah untuk memantau, mengevaluasi, serta melaporkan capaian kinerja secara lebih efektif dan efisien. Tanpa adanya integrasi yang baik antar sistem digital yang digunakan, informasi kinerja yang dihasilkan berpotensi mengalami perbedaan atau ketidaksinkronan, sehingga dapat mempengaruhi kualitas proses monitoring dan evaluasi kinerja organisasi. Oleh karena itu, pengembangan sistem pengelolaan kinerja berbasis teknologi informasi tidak hanya menekankan pada penggunaan aplikasi digital, tetapi juga pada bagaimana sistem-sistem tersebut dapat saling terintegrasi dan menghasilkan data kinerja yang konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel (Kettl, 2015).

Selain integrasi sistem digital, keselarasan indikator kinerja juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja yang selaras dan terstruktur dengan baik akan memudahkan organisasi dalam mengukur capaian program serta menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Sebaliknya, apabila indikator kinerja yang digunakan dalam berbagai sistem pengelolaan kinerja tidak selaras, maka proses pengukuran dan evaluasi kinerja dapat menjadi kurang optimal karena adanya perbedaan standar pengukuran yang digunakan. Dalam kondisi tersebut, analisis mengenai bagaimana penerapan dan penyebaran sistem digital pengelolaan kinerja, khususnya aplikasi SAKIP, menjadi penting untuk dilakukan. Kajian

mengenai difusi aplikasi SAKIP dalam organisasi pemerintah daerah diperlukan untuk memahami bagaimana sistem tersebut diadopsi, diimplementasikan, serta diintegrasikan dengan sistem pengelolaan kinerja lainnya dalam mendukung transformasi digital pengelolaan kinerja pemerintahan (Pollitt & Bouckaert, 2017).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa penerapan sistem digital dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam praktiknya, penggunaan berbagai aplikasi pengelolaan kinerja di lingkungan pemerintah daerah, seperti aplikasi SAKIP, E-Monev, dan E-Kinerja, masih menghadapi berbagai tantangan terkait integrasi sistem dan keselarasan indikator kinerja. Perbedaan pendekatan dalam penyusunan indikator kinerja serta penggunaan sistem informasi yang berbeda dapat menyebabkan ketidaksesuaian data kinerja antar aplikasi, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi informasi dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem pengelolaan kinerja berbasis digital masih memerlukan kajian yang lebih mendalam, khususnya dalam memahami bagaimana inovasi sistem digital tersebut diadopsi dan diterapkan dalam organisasi pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, analisis mengenai proses difusi inovasi menjadi penting untuk memahami bagaimana penerapan sistem digital pengelolaan kinerja dapat berjalan secara efektif dalam mendukung peningkatan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Rogers, 2003; Mardiasmo, 2018).

Selain itu, kajian mengenai penerapan aplikasi SAKIP dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah daerah juga menjadi relevan untuk dilakukan guna memahami dinamika implementasi sistem digital dalam organisasi pemerintahan. Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro juga menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis digital sebagai bagian dari implementasi kebijakan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan aplikasi SAKIP dalam mendukung transformasi digital pengelolaan kinerja pada instansi tersebut menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses implementasi dan integrasi sistem pengelolaan kinerja di tingkat perangkat daerah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Difusi Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Mendukung Transformasi Digital Pengelolaan Kinerja (Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro).”

B. PERUMUSAN MASALAH

Pada dasarnya suatu penelitian dilakukan berdasarkan tujuan awal yang dimiliki oleh peneliti yaitu untuk memperoleh data yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pemecah masalah yang ada dalam topik penelitian. Setiap penelitian yang ingin dilakukan harus berdasarkan masalah yang telah ditemukan dalam pencarian informasi awal. Walaupun diakui bahwa masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian (Truckman, 1988). Dalam konteks penelitian ini, permasalahan muncul dari adanya fenomena dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah yang saat ini semakin memanfaatkan sistem digital melalui berbagai aplikasi pengelolaan kinerja, seperti aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev), serta E-Kinerja. Namun dalam praktiknya masih ditemukan adanya ketidaksesuaian data kinerja antar aplikasi yang disebabkan oleh perbedaan indikator kinerja dan pendekatan kebijakan yang digunakan oleh masing-masing sistem. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi data kinerja serta kesulitan dalam integrasi sistem digital pengelolaan kinerja di lingkungan pemerintah daerah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan permasalahan yang ada dan harus dijawab melalui proses pengumpulan dan analisis data secara ilmiah (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan uraian mengenai rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana difusi aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendukung transformasi digital pengelolaan kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan difusi aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendukung transformasi digital pengelolaan kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.

2. Kegunaan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) manfaat penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian, guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan didalam topik penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan harapan menghasilkan informasi yang rinci, akurat dan aktual yang dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya difusi aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendukung transformasi digital pengelolaan kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

b) Secara praktis

1) Bagi Mahasiswa

Bahan pertimbangan dan masukan yang lebih baik untuk mahasiswa mengenai penelitian difusi aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendukung transformasi digital pengelolaan kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang berguna bagi peningkatan peningkatan kualitas Pendidikan dan dapat menambah referensi penelitian dengan topik tentang difusi aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendukung transformasi digital pengelolaan kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan agar dapat memudahkan pembaca dalam menguraikan objek penelitian dan juga memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini, maka susunan sistematika penulisan penelitian ini adalah :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang didalamnya menguraikan isi berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua, merupakan bab dimana penulisan menguraikan tentang teori, konsep terkait dengan Difusi aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Dalam mendukung transformasi digital pengelolaan kinerja: Studi pada Satpol PP Kabupaten Bojonegoro. Dalam bab dua ini juga menguraikan tentang penelitian terdahulu.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga, merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga uraian didalamnya meliputi, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, manajemen data, serta teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan dimana didalamnya menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai difusi aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendukung transformasi digital pengelolaan kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.

5. BAB V PENUTUP

Bab lima, merupakan bab penutup dimana bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dalam penelitian yang dilakukan. Dengan adanya bab penutup, pembaca dapat memperoleh gambaran riil tentang hasil penelitian dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian tersebut.